

## Pengaruh Faktor Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Imam Patoni<sup>1</sup>, Adianto<sup>2</sup>, Agus Priyanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Email: [nilalukitasari22@gmail.com](mailto:nilalukitasari22@gmail.com)<sup>1</sup>, [adianto@lecturer.ut.ac.id](mailto:adianto@lecturer.ut.ac.id)<sup>2</sup>, [guspri@ecampus.ut.ac.id](mailto:guspri@ecampus.ut.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Kementerian atau Lembaga Negara baik pusat maupun daerah merupakan sebuah organisasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam sebuah organisasi perlu sebuah arah atau tujuan sesuai dengan visi dan misi setiap organisasi. Teknik sensus digunakan dalam pengambilan data primer untuk menggambarkan seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel bebas yang mempengaruhi konsumen secara dominan adalah variabel ketepatan (X6) karena mempunyai nilai koefisien regresi yang sebesar yaitu 0,137. Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh faktor efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan secara simultan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel ketepatan (X6) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Indragiri Hilir terbukti.

**Kata Kunci** : Factor Efektivitas, Faktor Efisiensi, Pengaruh

### Abstract

Ministries or State Institutions, both central and regional, are public organizations that have duties and responsibilities towards the people. An organization needs a direction or goal in accordance with the vision and mission of each organization. The census technique is used in collecting primary data to describe how much the factors influence the successful implementation of the national strategic program for Complete Systematic Land Registration at the Land Office of Indragiri Hilir Regency. The results of testing the second hypothesis show that the independent variable that influences consumers dominantly is the accuracy variable (X6) because it has a regression coefficient value of 0.137. The objectives to be achieved with this research are to analyze and describe the influence of the factors of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy simultaneously affecting the successful completion of the Complete Systematic Land Registration program at the Indragiri Hilir District Land Office. Thus the second hypothesis states it is proven that the accuracy variable (X6) is the dominant variable influencing the successful completion of the Complete Systematic Land Registration program in Indragiri Hilir Regency.

**Keywords**: Effectiveness Factor, Efficiency Factor, Influence

## PENDAHULUAN

Kementerian atau Lembaga Negara baik pusat maupun daerah merupakan sebuah organisasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam sebuah organisasi perlu sebuah arah atau tujuan sesuai dengan visi dan misi setiap organisasi. Organisasi yang baik harus mempunyai visi & misi yang didasarkan pada kondisi yang melekat pada masing-masing organisasi. Perlu diketahui bahwa organisasi pemerintahan seperti lembaga vertikal maupun horizontal atau pusat dan daerah merupakan alat negara untuk menerjemahkan visi dan misi Presiden dalam proses pembangunan baik jangka panjang, menengah dan pendek. Salah satu Kementerian yang juga menerjemahkan visi dan misi Presiden ke dalam visi dan misi organisasi adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dahulu nomenklatur lama bernama Badan Pertanahan Nasional kemudian pada tahun 2014 menjadi Kementerian dan tambahan tata ruang sebagai bagian tupoksi kerjanya. Menurut Menteri Sofyan Djalil dengan nomenklatur baru Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana penataan ruang yang sinkron dengan pertanahan. Penambahan tata ruang sangat penting, tanpa penataan ruang yang jelas, suatu daerah akan tumbuh berkembang semrawut tanpa perencanaan. Oleh sebab itu, tata ruang harus dipikirkan untuk jangka panjang.

Ditetapkannya urusan tata ruang menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Agraria, Terdapat peluang untuk memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini. Perkembangan terakhir yang disajikan oleh beragam media berupa respon terkait aktivitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang merefleksikan upaya tersebut. Beberapa isu yang memang menjadi perhatian bersama misalnya integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan akan peta yang terintegrasi (*one map policy*), dan penggabungan urusan penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun demikian, dua hal lain yang juga perlu mendapatkan pertimbangan pertama upaya untuk meningkatkan efektivitas kerja Kementerian ini dan kedua upaya mengatasi problematika penataan ruang yang selama ini menghambat banyak Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana tata ruangnya.

Salah satu tugas Kementerian ATR/BPN adalah untuk mewujudkan harapan keadilan hak atas tanah dan keadilan dalam pemanfaatan ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka menjadikan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan pekerjaan besar sekaligus pekerjaan mulia yang diamanahkan pada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Amanah ini mengandung sejuta harapan yang harus diwujudkan bersama. Sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mewujudkan amanah tersebut. Selain mewujudkannya, yang tidak kalah penting adalah percepatan yang dilakukan untuk mewujudkannya.

Implementasi Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya membuat visi misinya menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia. Berdasarkan visi itu maka perlu menyusun Rencana strategis (RENSTRA) secara baik dan berkualitas. RENSTRA disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu lima tahun. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (*outcome*) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian atau Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Pada Hari Agraria Nasional Tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa sampai dengan akhir 2016, baru sekitar 45% jumlah bidang yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi memberikan tantangan kepada

Kementerian ATR/BPN untuk mensertifikatkan seluruh tanah di Indonesia yang diharapkan selesai tahun 2025.

Target sertifikasi tanah ini dimulai tahun 2017 dengan target 5 juta bidang tanah, kemudian meningkat lagi menjadi 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 9 juta sertifikat tanah yang akan diterbitkan, dan dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah sehingga diharapkan pada tahun 2025 semua bidang tanah di Indonesia dapat terpetakan.

Untuk mewujudkan amanat Presiden perlunya akselerasi atau percepatan pembangunan infrastruktur keagrariaan diantaranya meliputi bidang pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengukuran dan pemetaan peta dasar. Program percepatan ini yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam mewujudkan target tersebut Menteri ATR/BPN menetapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program percepatan pendaftaran tanah bukanlah program yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah. Pada tahun 1981 Pemerintah mencanangkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA dengan tujuan utama memproses pensertifikatan tanah secara massal, terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, dan objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam bagian wilayah desa/kelurahan serta menyelesaikan secara tuntas sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Kemudian diluncurkan inovasi percepatan pendaftaran tanah melalui Program PTSL. PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Penerbitan sertifikat tanah dari program PTSL pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program PRONA, yaitu sama-sama dilaksanakan secara gratis, persyaratan dari pendaftaran hak, dan penerbitan serta pelayanan dari Kantor Pertanahan. Perbedaan antara PRONA dan PTSL yaitu melalui program PRONA, pendataan penerima sertifikat PRONA dilakukan secara merata diseluruh desa atau kelurahan dalam satu Kabupaten/Kota dan PRONA hanya menerbitkan sertifikat tanah tidak menyeluruh pada semua bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu daerah. Sedangkan program PTSL, penelitiannya dilakukan secara menyeluruh dalam satu desa atau kelurahan dan seluruh bidang tanah dalam daerah tersebut dilakukan klusterisasi sehingga bisa menghasilkan daftar tanah dalam satu desa. Semua Tanah yang tidak bermasalah dilakukan penerbitan sertifikat dan untuk tanah bermasalah ditunda penerbitan sertifikat sampai persoalan diselesaikan oleh para pihak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan lembaga pemerintahan yang vertikal dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan visi misi dan program kerja organisasi Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia. Selain melaksanakan fungsi pelayanan rutin terhadap masyarakat juga dihadapkan pada tuntutan untuk melaksanakan program strategis nasional yaitu Program PTSL, keberhasilan penyelesaian target PTSL di Kantor Pertanahan Indragiri Hilir berpengaruh besar terhadap keberhasilan PTSL secara Nasional.

Artikel ini menyajikan evaluasi program, dengan fokus pada dua hasil program peningkatan kapasitas yang penting: peningkatan kapasitas penelitian dan efektivitas yang lebih besar di arena

kebijakan. Sebuah desain refleksif digunakan. Hasilnya menunjukkan pendekatan program ini menjanjikan. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yang dilakukan oleh penulis, yaitu metode kuantitatif dengan persamaan dua variabel yaitu efektivitas dan akuntabilitas. Adapun persamaan yang sama lainnya adalah pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuesioner.

Menurut penelitian Evaluasi Kebijakan oleh Irma Yudith Ayu Puspita (2012) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemulangan dan Penguburan Pasien Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Pasca Perawatan Pada RSUD Kabupaten Bekasi Agustus 2011 – Mei 2012, Penulis menggunakan pendekatan *William N. Dunn* dan *David Easton* serta *Azrul Azwar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemulangan dan penguburan pasien PGOT diperlukan kebijakan lintas sektoral antara RSUD Kab. Bekasi dengan Dinas terkait salah satunya Dinas Sosial. Diperlukan peran serta *stakeholders*, masyarakat dan komitmen pemerintah, karena PGOT Kab Bekasi dalam keadaan hidup maupun meninggal merupakan warga Negara Indonesia yang perlu diperhatikan.

Menurut penelitian Yenchilia Tresna Damanik (2016) menerangkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, partisipasi masyarakat, program pemerintah yang harus dilaksanakan, dan program sesuai dengan kapasitas masyarakat. Adapun faktor penghambatnya yaitu modal, tidak dilaksanakan secara periodic, tidak berkelanjutan dan peran pendamping masih lemah. Dengan begitu perlunya memaksimalkan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan menurut Akbar Sanjaya dan Aceng Ulumudin (2018) menjelaskan rata-rata dari tanggapan responden dari konsep evaluasi kebijakan promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sudah sangat baik. Sedangkan tanggapan responden terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut rata-rata setiap responden memberikan tanggapan yang sangat baik dan besaran pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sebesar 39.69% dan sisanya 60.31% ditentukan oleh variabel lain.

Menurut Sirajul Huda, M. Uhaib As'ad, Decky Kuncoro (2021) dengan Judul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru. Penulis menggunakan teori *William N. Dunn* dan teori *Edward III* dengan metode Kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protocol kesehatan yang telah dianjurkan oleh Pemerintah. Kemudian pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Banjarbaru sangat memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah, contohnya seperti pedagang kaki lima, ojek online dan UMKM.

Keberhasilan Program PTSL tahun 2020 tidak lepas dari Faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kantor Pemerintahan dapat dilakukan dengan pendekatan peningkatan kualitas pegawai pada semua tingkatan. Kualitas pegawai yang semakin tinggi diharapkan semakin tinggi keberhasilan Program, sebaliknya semakin rendah kualitas pegawai, dimungkinkan semakin rendah pula keberhasilan Program. Kinerja yang dimiliki oleh birokrasi merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai. Pegawai akan bersedia bekerja apabila merasa kebutuhannya terpenuhi.

Tujuan adanya sistem SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun pemilihan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil

melaksanakan program PTSL pada Tahun 2019 dan 2020. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir”.

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh faktor efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan secara simultan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan teori tentang evaluasi kebijakan. Dan Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap peningkatan kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian terdahulu adalah penelitian penelitian yang telah penulis telaah dan juga sebagai salah satu acuan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu disadur dari beberapa jurnal penelitian, artikel, baik jurnal dari dalam negeri maupun jurnal luar negeri. Pada penelitian terdahulu yang disadur, diringkas menjadi tabel sehingga lebih mudah untuk dipahami. Adapun dalam penelitian terdahulu mencakup nama, tahun dan judul penelitian, Teori dan Metode penelitian, Hasil analisis, persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu terhadap tulisan penulis. Adapun berikut ini adalah penelitian terdahulu yang hampir menyerupai tulisan penulis.

Penelitian yang menyerupai penelitian penulis adalah penelitian Struyk & Haddaway (2012) yang berjudul, Mentoring Organisasi Riset Kebijakan: Hasil Evaluasi Proyek. Metode Evaluasi yang dilakukan Struyk dan Haddaway (2012) adalah hampir menyerupai dengan penelitian penulis yaitu metode kuantitatif, dengan beberapa variabel yang hampir mirip dengan penelitian penulis, yaitu variabel efektivitas dan akuntabilitas.

## **METODE**

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui atau menunjukkan kebenaran atau pemecahan masalah. Sedangkan metode penelitian berfungsi sebagai acuan dan tuntutan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian pada Bab ini berisi Desain Penelitian, Sumber Informasi, Instrumen Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. Berikut ini Metode Penelitian Pengaruh faktor efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan responsivitas, ketepatan, terhadap keberhasilan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Teknik sensus digunakan dalam pengambilan data primer untuk menggambarkan seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan baik secara simultan maupun parsial.

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk

melakukan inferensi (pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal.

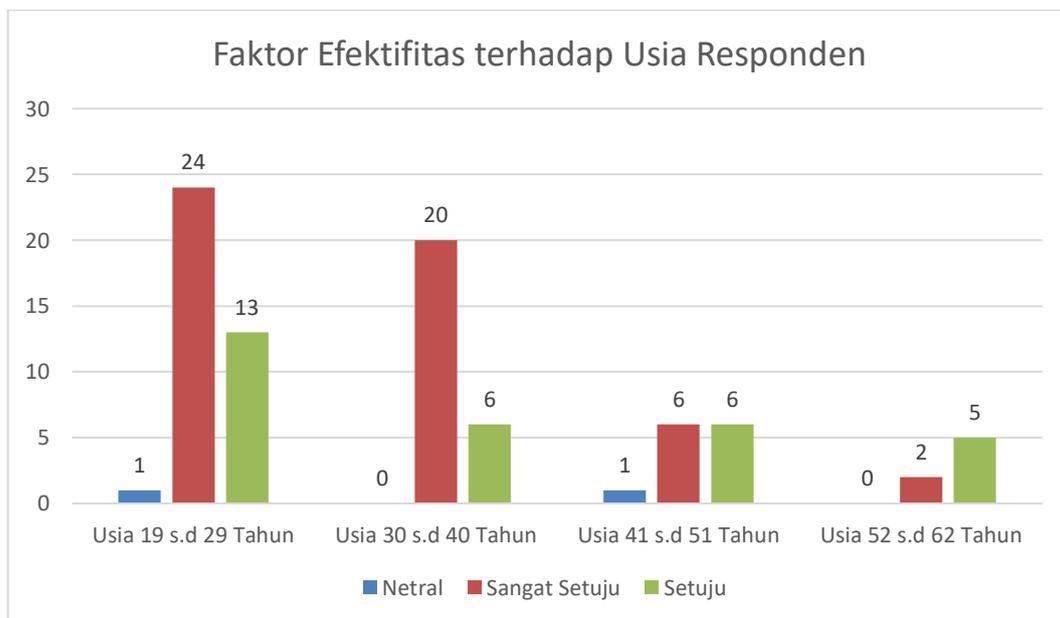
Populasi menurut Sugiyono (2013), adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan metode sensus dalam pengambilan data primer. Sensus ini didasarkan karena keseluruhan responden di Kantor Pertanahan Indragiri Hilir menjadi objek penelitian. Sehingga populasi tersebut menjadi objek sensus dalam upaya untuk mengetahui pengaruh efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap keberhasilan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas

Efektif adalah tercapainya hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan terhadap sasaran yang telah ditetapkan (Akibu, 2014;5). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap efektivitas adalah sangat setuju dengan persentase 62,5%. Sebanyak 62,5% responden menyatakan bahwa efektivitas mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL. Profil responden yang menyatakan Setuju ini terbagi menjadi tiga karakteristik profil yaitu tingkat pendidikan, usia/umur, dan jenis kelamin.

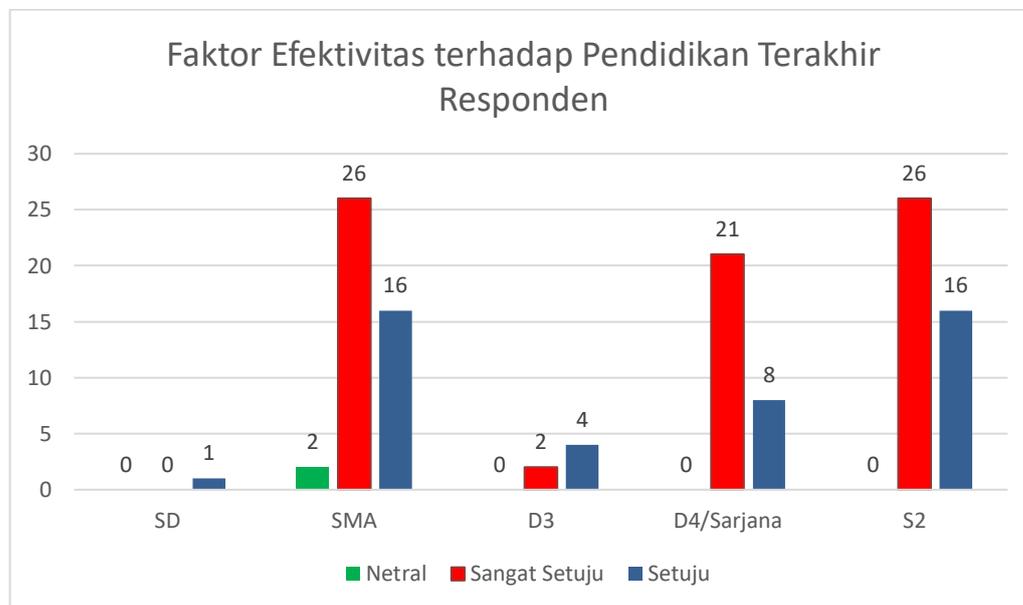
Berdasarkan pilihan bahwa faktor efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori usia adalah 24 responden berasal dari tingkatan usia 19-29 tahun, 20 responden berasal dari tingkatan usia 30-40 tahun, 6 responden berasal dari tingkatan usia 41-51 tahun, dan sejumlah 2 responden dari tingkatan usia 52-62 tahun. Secara lebih lengkap Pilihan Faktor Efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL digambarkan pada diagram tabel 4.8 berikut



**Gambar 4. 8 Faktor Efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan kategori Usia**

Berdasarkan pilihan bahwa faktor efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori jenis kelamin adalah mayoritas jenis kelamin laki-laki memilih Sangat setuju yaitu sebanyak 39 orang, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang, sedangkan yang memilih Setuju yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 18 orang, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang. Selain itu pilihan netral menjadi pilihan minoritas, dimana laki-laki dan perempuan yang memilih netral sama sama berjumlah 1 orang.

Berdasarkan pilihan bahwa faktor efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori pendidikan Sekolah Menengah Atas, D4/Sarjana, dan S2 dominan memilih setuju terhadap faktor Efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL dengan jumlah responden yang memilih sebesar 26 orang (Pendidikan Sekolah Menengah Atas), sebesar 21 orang (Pendidikan D4/Sarjana) dan 26 orang berpendidikan terakhir Sarjana Magister (S2). Secara lebih lengkap Faktor Efektivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan kategori pendidikan Terakhir digambarkan pada Tabel Diagram 4.9 berikut ini



**Gambar 4. 9 Faktor Efektifitas mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan kategori Pendidikan Terakhir**

Tingkat persentase keefektifan dapat dilihat berdasarkan persentase responden yang setuju terhadap penunjukkan personil dalam Tim PTSL. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akibu (2014;5) yang menyatakan, Jika hasil kebijakan mendekati sasaran berarti nilai efektifitasnya tinggi. Persentase nilai efektifitas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa penunjukkan personil dalam Tim PTSL baik jumlah dan kompetensi telah dilaksanakan dengan baik. Responden juga menyatakan persyaratan pendaftaran PTSL telah sesuai dengan Petunjuk Teknis, dan mudah untuk dilengkapi. Serta koordinasi dengan perangkat Desa telah dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Persentase atas tanggapan Responden Netral sebesar 13,3%. Persentase sebesar 13,3% disebabkan karena responden masih belum mengetahui apakah efektivitas mempengaruhi keberhasilan program PTSL. Sehingga responden memilih Netral dikarenakan kinerja personil tim PTSL tidak begitu terlihat dalam pelaksanaan PTSL. Pakta integritas tidak begitu memotivasi penyelesaian PTSL, responden tidak begitu mengetahui persyaratan PTSL dan peran Panitia Ajudikasi, Satgas dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan PTSL.

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia dengan adanya Program PTSL menunjukkan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk dapat mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya PTSL yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum terhadap tanahnya. Jika dilihat dari hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pendaftaran tanah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PTSL di Kabupaten Indragiri hilir telah berjalan

dengan efektif.

### **Efisiensi**

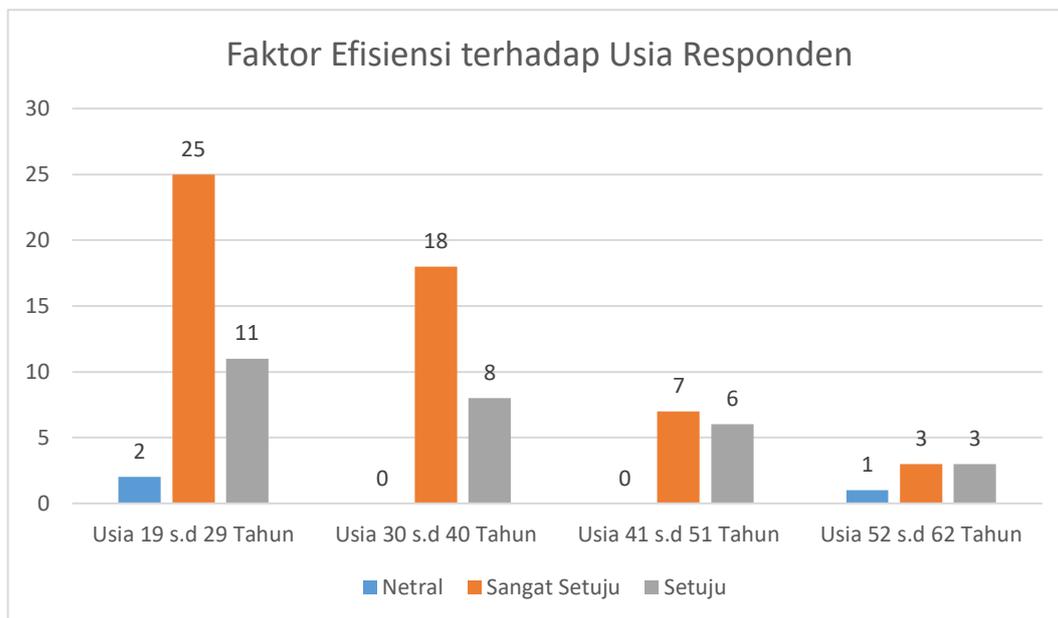
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap efisiensi adalah setuju dengan persen 62,5%. Hal ini dikarenakan responden menyatakan efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL. Keberhasilan ini dinilai dari ketersediaan ruang khusus dan perangkat pendukung PTSL mempermudah pelaksanaan program PTSL, ketersediaan akomodasi di tempat lokasi PTSL mendukung pelaksanaan PTSL, alat-alat dan kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data yuridis tersedia secara lengkap, ketersediaan media informasi memberikan kemudahan pimpinan dalam mengarahkan tim PTSL, dan kejelasan biaya telah diketahui oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan PTSL.

Tanggapan Responden Netral dengan Persen 13,3%. Tanggapan netral oleh responden disebabkan karena sebagian responden tidak mengetahui apakah efisiensi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL. Efisiensi berhubungan dengan efektifitas. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara optimum untuk mencapai tujuan.

Pada dimensi efisiensi ini, yang dinilai adalah terjangkaunya biaya dari pembuatan sertifikat tanah melalui kegiatan PTSL. Terjangkaunya biaya dari pembuatan sertifikat tanah melalui kegiatan PTSL sejalan dengan pernyataan Krisnina (2017;5) dimana efisiensi ditentukan berdasarkan hitungan biaya per layanan. Kebijakan yang yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Keberhasilan program PTSL menurut biaya dari pembuatan sertifikat telah efisien. Adapun biaya maksimal yang dibebankan pada masyarakat apabila mengikuti program PTSL sebesar Rp 200.000 sesuai dengan peraturan SKB Menteri. Nilai harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pendaftaran tanah pertama kali secara mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 pendaftaran pertama kali (pengakuan hak) akan membutuhkan biaya yang cukup besar karena melewati banyak proses.

Proses-proses untuk pendaftaran pertama kali (pengakuan hak) adalah dimulai dari pendaftaran pengukuran yang akan menerbitkan peta bidang tanah. Setelah terbit peta bidang tanah, maka perlu didaftarkan peta bidang tersebut dan melengkapi Akta (baik Akta Jual Beli/Waris/Hibah). Pembuatan akta dilakukan di Kantor Notaris. Biaya untuk menjalankan berkas pengakuan hak/pendaftaran tanah pertama kali tentu saja lebih besar dibandingkan dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Peraturan SKB Menteri. Pada tahap PTSL ada beberapa tahapan yang dipangkas seperti tidak perlu adanya Akta dari notaris.

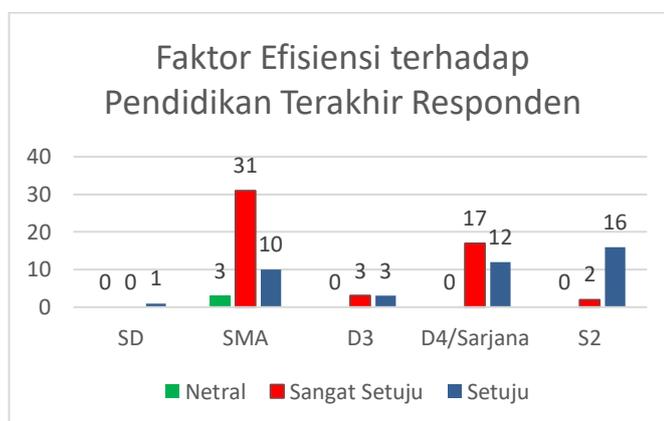
Berdasarkan pilihan bahwa faktor efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori usia adalah pada rentang usia 19-29 tahun yang memilih sangat setuju sejumlah 25 responden, rentang usia 30-40 tahun yang memilih setuju sebanyak 18 responden, dan pada usia 41-51 tahun yang memilih Sangat Setuju adalah sebanyak 7 responden, dan dari usia 52-62 tahun yang memilih setuju adalah sebanyak 3 responden. Secara lebih lengkap digambarkan Pada Gambar 4.10 berikut ini



**Gambar 4. 10** Faktor Efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan rentang usia

Berdasarkan pilihan bahwa faktor efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori jenis kelamin menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki yang memilih netral sebanyak 1 responden, yang memilih sangat setuju berjumlah 39 responden, dan yang memilih setuju berjumlah 18 responden. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yang memilih netral adalah berjumlah 2 responden, yang memilih sangat setuju berjumlah 14 responden, dan yang memilih setuju adalah berjumlah 10 responden.

Berdasarkan pilihan bahwa faktor efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori jenis pendidikan terakhir dapat dilihat bahwa kategori pendidikan SMA, D4/Sarjana merupakan jenis pendidikan yang dominan memilih sangat setuju bahwa Faktor Efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL. Secara lebih lengkap Faktor efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL dapat dilihat pada diagram tabel 4.11 berikut ini



**Gambar 4. 11** Faktor Efisiensi mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan Jenis Pendidikan Terakhir Responden

### Kecukupan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kecukupan adalah setuju dengan persen 62,5%. Hal ini dikarenakan responden menyatakan kecukupan mempengaruhi

keberhasilan PTSL dilihat dari indikator satgas dalam pengumpulan data yang mengingap di desa hingga target tercapai sehingga dapat mengurangi biaya akomodasi tim dalam pengumpulan data fisik dan yuridis. Pengumpulan data fisik dan yuridis yang dilakukan bersamaan dengan petugas desa juga menunjukkan keberhasilan PTSL dapat diselesaikan lebih cepat.

Hal ini sesuai dengan Tanggapan Responden yang mencapai 81% (30,4 % responden memilih Sangat Setuju dan 50,6% memilih Setuju) dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan bersamaan dengan petugas data agar lebih cepat. Responden yang memilih Tanggapan Netral dengan sebesar 13,3%. Responden memilih netral yang menyatakan bahwa kecukupan tidak terlalu mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL karena pada saat satgas fisik dan satgas yuridis turun secara bersama juga memerlukan biaya yang besar.

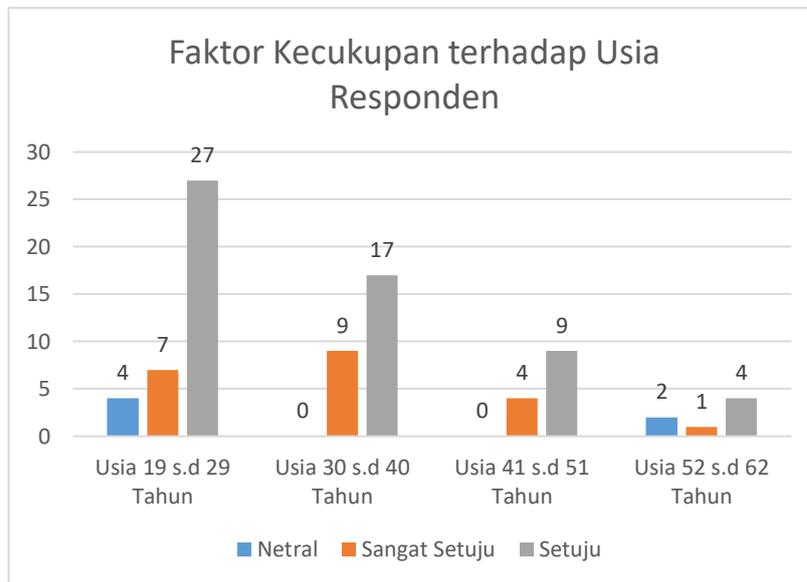
Jika dilihat dari segi Pemerintah, pelaksanaan program PTSL bertujuan untuk mengatasi masalah lambatnya kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Biaya yang mahal dan pengurusan pembuatan sertifikat yang rumit sering kali disebut sebagai penyebab utama masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya. Adanya program PTSL menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Hal ini karena kegiatan pendaftaran tanah telah dibiayai dan disubsidi oleh Negara.

Masyarakat peserta kegiatan PTSL hanya dibebankan biaya persiapan pra pendaftaran tanah yang besarnya diatur oleh SKB 3 Menteri. Selain itu dalam hal kepengurusannya juga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan karena petugas dari Kantor Pertanahan yang datang ke Desa atau daerah lokasi PTSL untuk kegiatan pengumpulan datanya.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan keringanan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat yang memperoleh sertifikat program PTSL. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum.

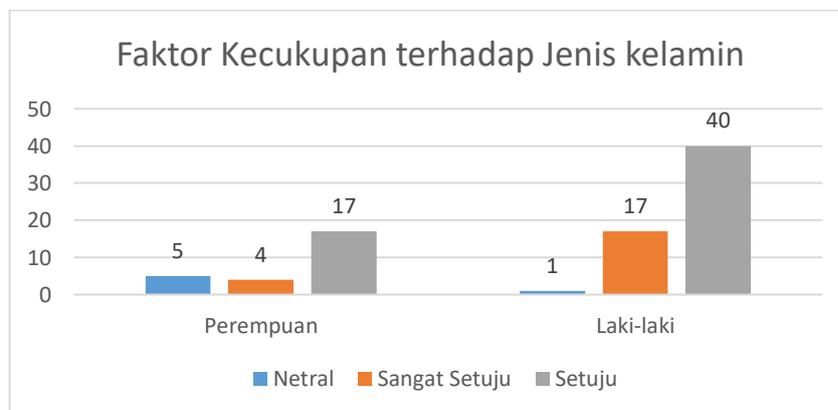
Kemudahan masyarakat membuat sertifikat dengan Program PTSL seperti pengurangan biaya, kemudahan akomodasi seperti tidak perlu bolak-balik ke kantor pertanahan atau notaris, juga adanya keringanan biaya BPHTB sesuai dengan pernyataan Krisnina (2017;5) yang menyatakan bahwa kecukupan berhubungan dengan efektivitas dengan memprediksi alternatif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Program PTSL mampu memberikan alternatif kemudahan dalam pendaftaran tanah.

Berdasarkan pilihan bahwa faktor kecukupan mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut kategori usia yang dikelompokkan dalam rentang usia 19 sd 29 tahun sejumlah 29 responden memilih setuju, rentang usia 30-40 tahun sejumlah 17 responden memilih setuju, Usia 41-51 sejumlah 9 responden memilih setuju, dan rentang usia 52-62 Tahun sejumlah 4 responden memilih setuju. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.12



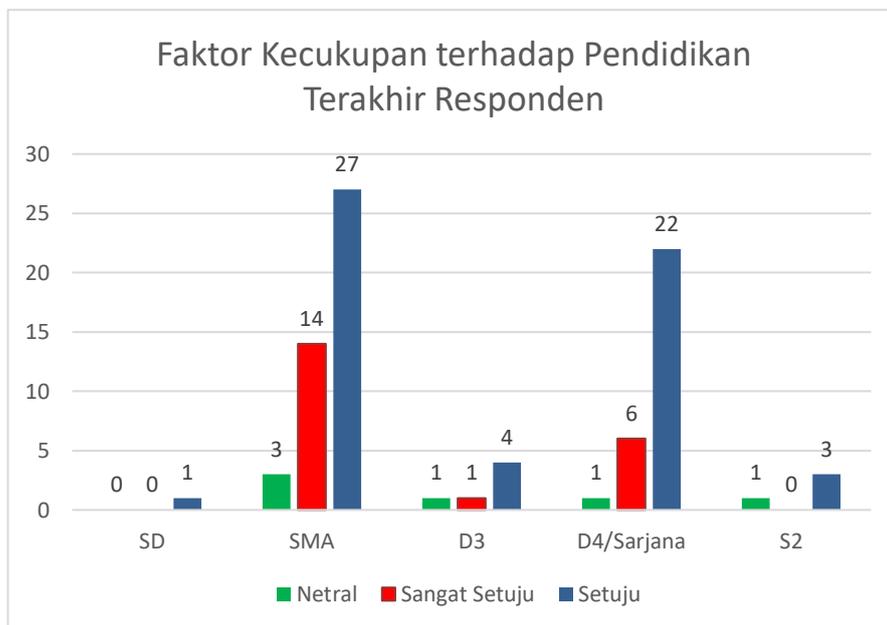
**Gambar 4. 12 Faktor Kecukupan mempengaruhi keberhasilan PTSL Usia Responden**

Berdasarkan Jenis kelamin, baik jenis kelamin perempuan maupun jenis kelamin laki laki cenderung lebih memilih setuju. Sejumlah 17 responden perempuan, dan 40 responden laki-laki setuju terhadap faktor kecukupan mempengaruhi keberhasilan responden. Pilihan Netral maupun sangat setuju dapat dilihat pada Gambar 4.13



**Gambar 4. 13 Faktor Kecukupan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan Jenis Pendidikan Terakhir Responden**

Berdasarkan Pendidikan terakhir responden juga mayoritas memilih setuju bahwa faktor kecukupan mempengaruhi keberhasilan PTSL, baik yang berpendidikan sekolah Menengah Atas, D3, D4/Sarjana, maupun yang berpendidikan S2. Rincian pilihan responden digambarkan lebih lengkap pada Gambar 4.14 berikut ini



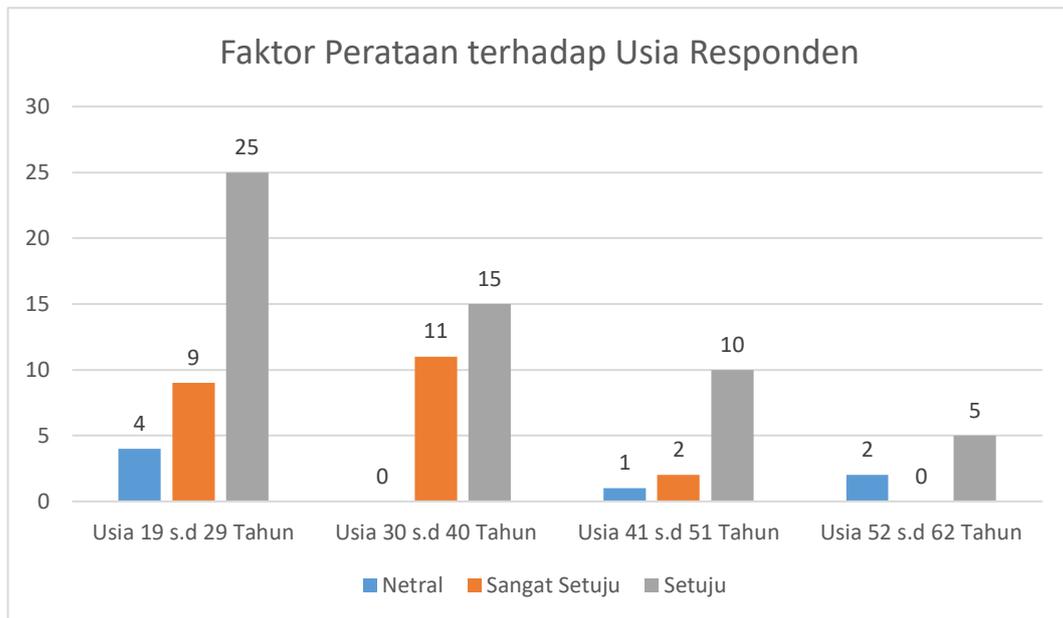
**Gambar 4. 14 Faktor Kecukupan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan Jenis Pendidikan Terakhir Responden**

### Perataan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap perataan adalah setuju dengan persen 62,5%. Hal ini dikarenakan responden menyatakan bahwa perataan mempengaruhi keberhasilan PTSL dilihat dari setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama (biaya dan kesempatan). Sesuai juknis dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan pemberian insentif (honor tambahan untuk kegiatan PTSL setelah selesai dilaksanakan). Tanggapan Responden Netral dengan Persen 13,3%. Hal ini dikarenakan masih terdapat responden yang tidak mengetahui biaya dalam pendaftaran PTSL, dan mengira bahwa jika ikut mendaftarkan tanah melalui PTSL biayanya mahal.

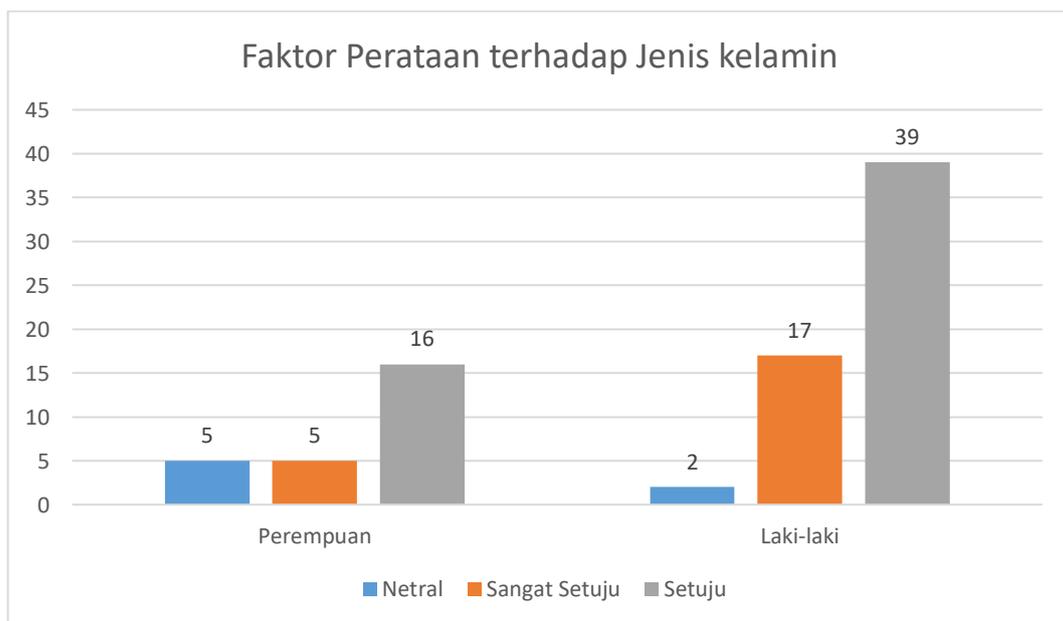
Kegiatan PTSL di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 sebanyak 7.000 bidang dan tahun 2020 sebanyak 4.500 bidang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan setiap kondisi ekonomi masyarakat dapat mendaftar program PTSL. Serta besaran biaya sesuai dengan SKB 3 Menteri untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu maksimal sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan rentang usia pilihan responden terhadap faktor perataan mempengaruhi keberhasilan PTSL menurut karakteristik usia responden adalah secara garis besar responden memilih setuju, yaitu dijabarkan sebagai berikut; sejumlah 25 responden dari kategori rentang usia 19 sampai 29 tahun memilih setuju, 9 responden memilih setuju, dan 4 responden memilih netral. Kategori rentang usia 30 hingga 40 tahun, 15 responden memilih setuju, 11 responden memilih sangat setuju, dan tidak ada responden yang memilih netral. Adapun untuk rentang usia lainnya dapat dilihat pada Gambar 4.15



**Gambar 4. 15** Faktor Perataan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan rentang usia Responden

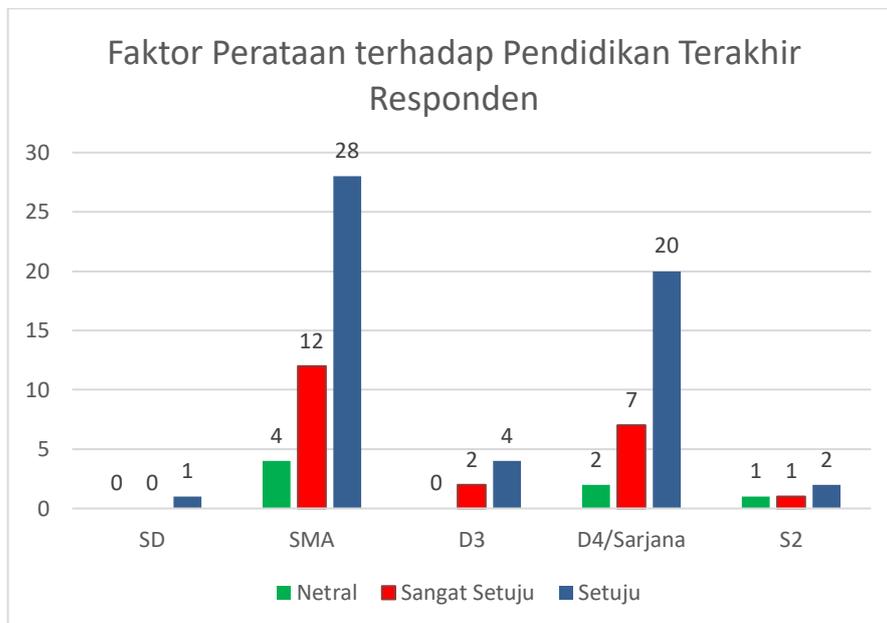
Berdasarkan jenis kelamin, baik responden yang berjenis kelamin laki-laki maupun responden yang berjenis kelamin perempuan didominasi memilih setuju, dengan rincian 16 responden perempuan memilih setuju, dan 39 responden laki-laki memilih setuju. Secara lebih lengkap digambarkan pada Gambar 4.16



**Gambar 4. 16** Faktor Perataan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis pendidikan terakhir responden 28 responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas memilih setuju, 12 responden memilih sangat setuju dan 4 responden memilih 4 Netral. Karakteristik responden yang berpendidikan D3 sejumlah 4 responden memilih Setuju, dan 2 responden memilih sangat setuju, sedangkan tidak ada responden yang memilih netral pada karakteristik pendidikan D3. Pada karakteristik responden menurut pendidikan terakhir jenjang

sarjana/DIV, 20 responden memilih setuju, 7 responden memilih sangat setuju, dan 2 responden memilih netral. Pada karakteristik responden menurut jenis pendidikan terakhir jenjang magister /S2, 2 responden memilih setuju, 1 responden memilih netral, dan 1 responden memilih sangat setuju. Secara lebih lengkap, pilihan responden menurut karakteristik jenis pendidikan terakhir digambarkan pada Gambar 4.17 berikut ini



**Gambar 4. 17 Faktor Perataan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut pendidikan terakhir.**

### Responsivitas

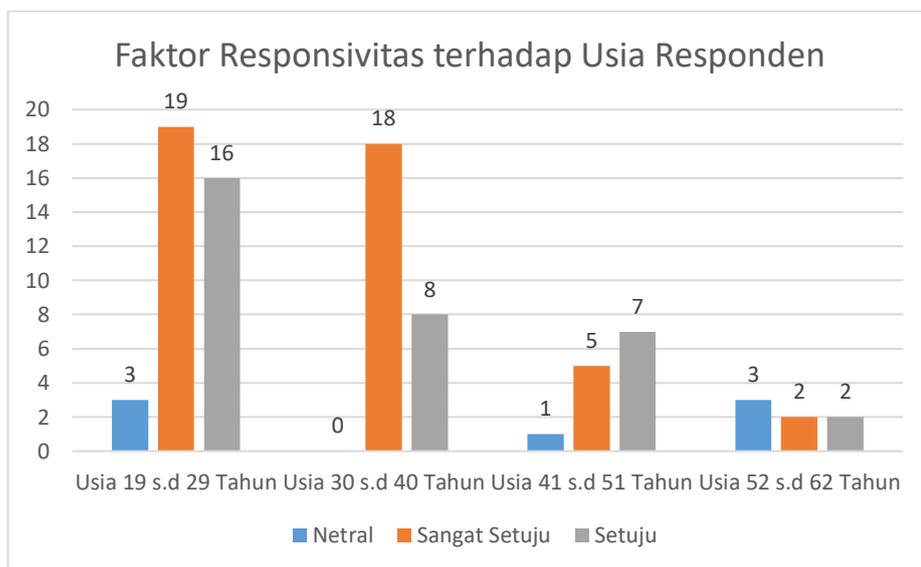
Responsivitas menunjukkan respons dari semua aktivitas (Duri dan Rahmah, 2020;8) Kriteria responsivitas melihat keberhasilan pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap responsivitas adalah setuju dengan persen 62,5%. Hal ini dikarenakan responden menyatakan bahwa responsivitas mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan PTSL telah dilakukan sesuai dengan standar operasi pelayanan yang telah ditetapkan dalam juknis. Tanggapan Responden Netral dengan Persen 13,3%. Hal ini dikarenakan responden tidak begitu mengetahui terkait standar operasional pelayanan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Pada dimensi responsivitas yang dinilai adalah apakah kebijakan yang diambil telah sesuai dengan permasalahan publik. Kebijakan pelaksanaan program PTSL dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan lambatnya pendaftaran tanah di Indonesia. Dimensi Responsivitas berhasil menunjukkan kebijakan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan lambatnya pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan adanya program PTSL, respons masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya meningkat, dikarenakan adanya subsidi biaya yang diberikan oleh pemerintah. Dunn (2003;437) mengemukakan bahwa responsivitas adalah hal yang paling disebabkan karena dimensi responsivitas dapat memuaskan semua dimensi lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal apabila belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dalam dimensi Responsivitas keberhasilan PTSL dikarenakan kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

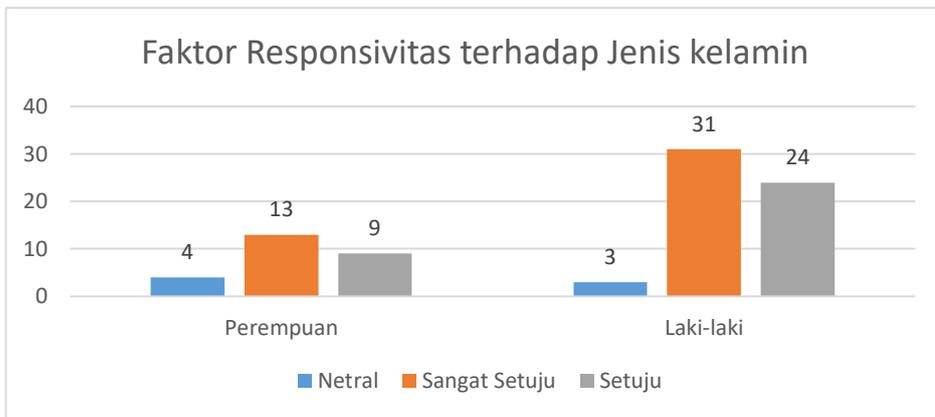
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021. Setiap kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan sistematis.

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan rentang usia, pilihan responden yang netral, setuju, ataupun sangat setuju beragam. Pada rentang usia 19-29 tahun, 16 responden memilih setuju, 19 responden memilih sangat setuju, dan 3 responden memilih netral. Pada rentang usia 30-40 Tahun 8 responden memilih Setuju, dan 18 responden memilih sangat setuju. Pada rentang usia 41 hingga 51 tahun 7 responden memilih setuju, 5 responden memilih sangat setuju, dan 1 responden memilih netral. Sedangkan pada rentang usia 52-62 Tahun, 2 responden memilih setuju, 2 responden memilih sangat setuju, dan 3 responden memilih netral. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.18



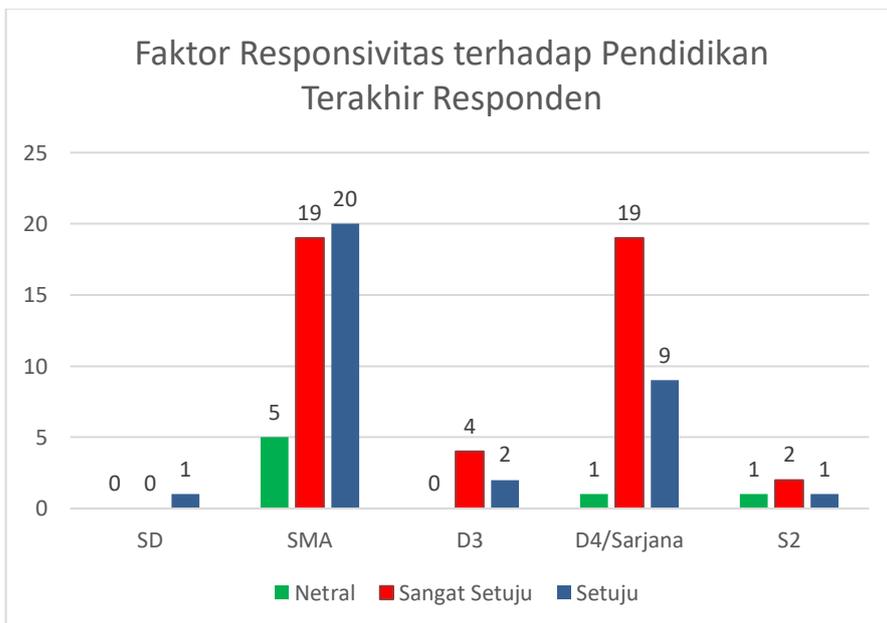
**Gambar 4. 18 Faktor responsivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut rentang usia**

Berdasarkan Jenis Kelamin, baik jenis kelamin perempuan maupun jenis kelamin laki-laki dominan sangat setuju menyatakan bahwa faktor responsivitas berpengaruh terhadap keberhasilan PTSL. Karakteristik jenis kelamin perempuan memilih setuju berjumlah 9 responden, memilih sangat setuju sejumlah 13 orang, dan memilih netral 4 orang. Sedangkan karakteristik jenis kelamin laki laki memilih setuju sejumlah 24 orang, memilih sangat setuju sejumlah 31 orang, dan memilih netral sejumlah 3 orang. Secara lebih lengkap digambarkan pada gambar 4.19



**Gambar 4. 18 Faktor Responsivitas mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin.**

Berdasarkan Jenis pendidikan Terakhir, pilihan responden terhadap pengaruh responsivitas terhadap keberhasilan PTSL sangat beragam. Tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas memilih setuju sejumlah 20 responden, memilih sangat setuju sejumlah 19 responden, dan memilih netral sebanyak 5 responden. Tingkat pendidikan terakhir D3 memilih setuju sejumlah 2 responden dan 4 responden memilih sangat setuju, di tingkat pendidikan terakhir sarjana/DIV memilih setuju sejumlah 9 orang, memilih sangat setuju 19 orang, dan memilih netral 9 orang. Sedangkan yang berpendidikan S2 memilih setuju 1 orang, memilih sangat setuju 1 orang, dan memilih netral 1 orang. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4. 19 berikut ini



**Gambar 4. 19 Faktor Perataan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut pendidikan terakhir.**

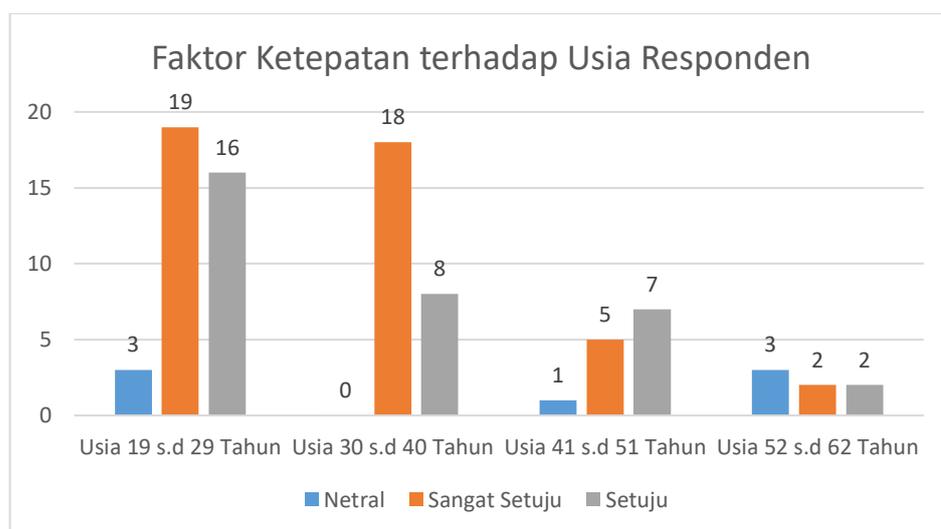
### Ketepatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap ketepatan adalah setuju dengan persen 62,5%. Hal ini dikarenakan responden menyatakan ketepatan mempengaruhi keberhasilan PTSL. Hal ini dapat dilihat dari responden mengetahui bahwa sertifikat dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan termasuk Pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, dan membantu permodalan masyarakat dalam berusaha.

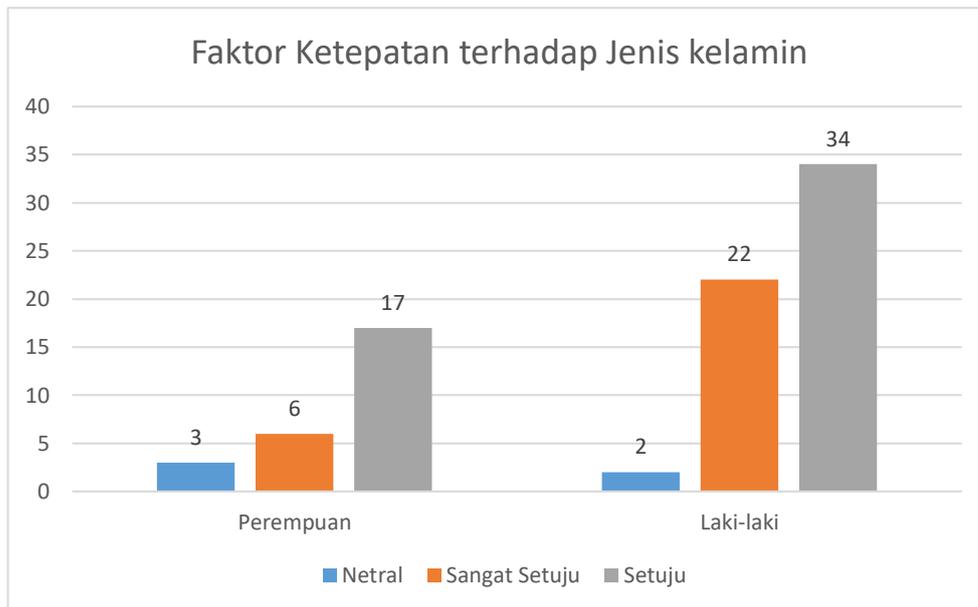
Tanggapan Responden Netral dengan Persen 13,3%. Hal ini dikarenakan responden masih ragu apakah sertifikat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, dikarenakan masih terdapat permasalahan tanah terhadap tanah yang sudah bersertifikat.

Berdasarkan Usia responden, yang menyatakan bahwa faktor ketepatan berpengaruh terhadap keberhasilan PTSL juga beragam. Pada rentang usia 19 hingga 29 tahun, sejumlah 16 responden memilih setuju, sejumlah 19 responden memilih sangat setuju, dan 3 responden memilih setuju. Pada rentang usia 30 hingga 40 Tahun, sejumlah 8 responden setuju, dan sejumlah 18 responden sangat setuju. Pada rentang usia 41 hingga 51 Tahun, sejumlah 7 responden setuju, 5 responden sangat setuju, dan 1 responden memilih netral. Selanjutnya pada rentang usia sejumlah 2 responden setuju, sejumlah 2 responden sangat setuju, dan sejumlah 3 responden netral. Secara lebih lengkap faktor ketepatan berpengaruh terhadap keberhasilan PTSL menurut karakteristik rentang usia dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut ini



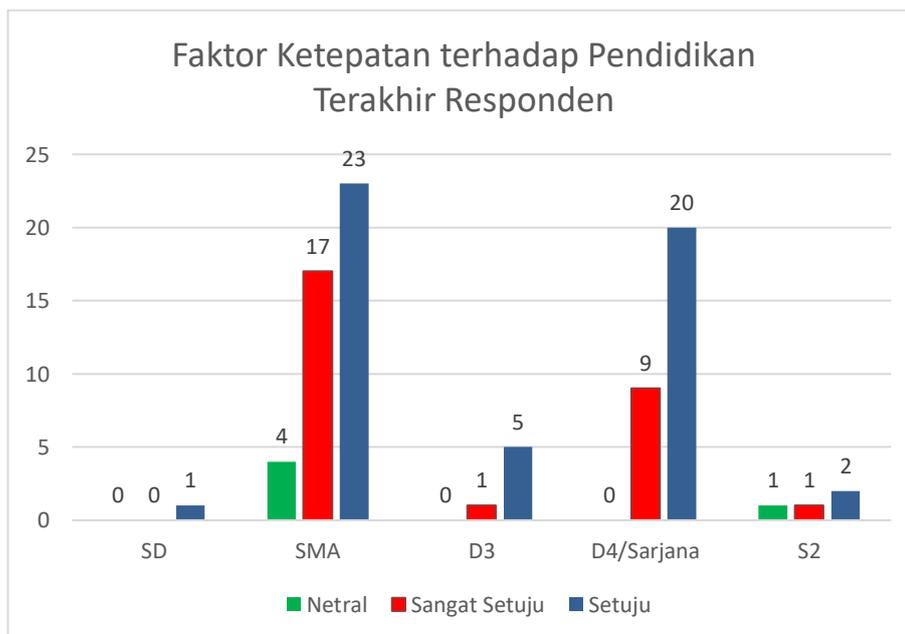
**Gambar 4. 20 Faktor ketepatan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut rentang usia**

Berdasarkan jenis kelamin, responden yang menyatakan faktor ketepatan mempengaruhi keberhasilan PTSL adalah responden berjenis kelamin perempuan dan responden berjenis kelamin laki-laki didominasi oleh jawaban setuju. Responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 17 orang memilih setuju, 6 orang memilih sangat setuju dan 3 orang memilih netral sedangkan responden berjenis laki-laki sejumlah 34 orang memilih setuju, 22 orang memilih sangat setuju, dan 2 orang memilih netral. Secara lebih lengkap digambarkan pada Gambar 4. 21



**Gambar 4. 21 Faktor ketepatan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin**

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir, responden menyatakan faktor ketepatan mempengaruhi keberhasilan PTSL adalah responden dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas adalah setuju berjumlah 23 orang, Sangat setuju berjumlah 17 orang, dan netral sejumlah 4 orang. Secara lebih lengkap faktor ketepatan berpengaruh terhadap keberhasilan PTSL menurut karakteristik pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut ini



**Gambar 4. 22 Faktor ketepatan mempengaruhi keberhasilan PTSL berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin**

### Rekapitulasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa Faktor ketepatan, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, efektivitas secara simultan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan hasil responden dapat diketahui bahwa responden paling tinggi menyatakan setuju sebanyak 58,4% dimana faktor efisiensi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Indragiri Hilir.

Indikator yang mempengaruhi dalam faktor Efisiensi yaitu ketersediaan ruang khusus dan perangkat pendukung PTSL mempermudah pelaksanaan program PTSL, ketersediaan akomodasi di tempat lokasi PTSL, alat-alat dan kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data yuridis tersedia secara lengkap, ketersediaan media informasi memberikan kemudahan pimpinan dalam mengarahkan tim PTSL, kejelasan biaya PTSL (sesuai SKB tiga Menteri) telah diketahui oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan implementasi PTSL.

## **Uji Statistik**

### **a. Uji Asumsi Klasik**

#### **1) Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal sebagai prasyarat analisis. Uji normalitas dalam analisis ini dilakukan dengan program SPSS yang menghasilkan gambar Normal P-P Plot. Gambar yang dihasilkan akan menunjukkan sebaran titik-titik.

Dari gambar 4.6 P-P Plot Sebaran titik-titik dari gambar Normal P-P Plot di atas relatif mendekati garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil ini sejalan dengan asumsi klasik dari regresi linier.

#### **2) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam model regresi berganda. Apabila terdapat multikolinearitas dalam model persamaan regresi berganda maka akan berakibat ketidakpastian dalam estimasi. Hal ini disebabkan karena dalam analisis regresi berganda, akan terdapat variabel bebas lebih dari satu yang diduga akan mempengaruhi variabel terikat. Bila tidak terjadi multikolinearitas maka pendugaan tersebut menjadi dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hubungan linier antara variabel independen, sebab bila ada hubungan yang linear antara variabel independen maka akan menimbulkan kesulitan dalam memasukkan pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan dependennya (Sudarmanto, 136:2005). Pengujian asumsi dengan uji korelasi antar variabel independen dengan matriks korelasi akan menjadi indikator ada atau tidaknya multikolinearitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) yaitu faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Tabel 4.34 di atas menunjukkan nilai VIF untuk variabel Efektivitas, variabel Efisiensi, variabel Kecukupan, variabel Perataan, variabel Responsivitas, variabel Ketepatan dengan nilai lebih kecil dari 10,00 dan nilai Toleransi untuk variabel Efektivitas, variabel Efisiensi, variabel Kecukupan, variabel Perataan, variabel Responsivitas, variabel Ketepatan menunjukkan lebih besar dari 0,100 sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala Multikolinearitas

#### **3) Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat bermacam-macam diantaranya dengan menggunakan melihat pola gambar scatterplots, pengujian ini dilakukan dengan meregresikan nilai residu

terhadap variabel-variabel independen. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas atau sebaliknya.

Menurut Imam Ghozali (2011:139) tidak terjadi Heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali pada scatterplots), serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

Gambar 2 scatterplots di atas menunjukkan sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu,menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas.

#### **b. Uji Regresi**

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik. Dari hasil sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Untuk melihat pengaruh Variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan secara simultan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir digunakan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 1,863 + 0,109X_1 + 0,130X_2 + 0,078X_3 + 0,093X_4 + 0,085X_5 + 0,137X_6$$

Dari persamaan Regresi diatas dapat dijelaskan bahwa Variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan Mempunyai arah koefisien regresi yang bertanda positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Serta Koefisien Regresi Efektivitas memberikan nilai sebesar 0,109 yang berarti bahwa variabel efektivitas semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dan Koefisien Regresi Efisiensi memberikan nilai sebesar 0,130 yang berarti bahwa variabel efisiensi semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Lalu, Koefisien Regresi Kecukupan memberikan nilai sebesar 0,078 yang berarti bahwa variabel Kecukupan semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Serta Koefisien Regresi Pemerataan memberikan nilai sebesar 0,093 yang berarti bahwa variabel Pemerataan semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Koefisien Regresi Responsivitas memberikan nilai sebesar 0,085 yang berarti bahwa variabel Responsivitas semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Lalu, Koefisien Regresi Ketepatan memberikan nilai sebesar 0,137 yang berarti bahwa variabel Ketepatan semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **c. Hasil Pengujian Hipotesis**

Hasil Pengujian Hipotesis dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh Variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan secara simultan dan parsial terhadap

keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengujian Hipotesis secara simultan dilakukan untuk melihat pengaruh dengan menggunakan Uji F, sedangkan Pengujian secara parsial dilakukan menggunakan Uji T

### 1). Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Di dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji hipotesis pertama dapat diterima atau tidak. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan  $F < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika nilai Sig.  $< 0,05$  maka artinya variabel independen (x) secara simultan berpengaruh terhadap variabel (y).

Dari tabel menunjukkan bahwa angka R sebesar 0,975. Hal ini menjelaskan bahwa ada korelasi atau hubungan antar variabel pengaruh dengan yang variabel terpengaruh sebesar 97,5%. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* memiliki angka 0,946 yang menunjukkan bahwa proporsi sumbangan variabel-variabel pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terpengaruh sebesar 94,6 % sedangkan 6,4 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model .

#### Uji hipotesis satu :

**Ho** : Faktor ketepatan, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, efektivitas secara simultan tidak mempengaruhi keberhasilan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

**H1** : Faktor ketepatan, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, efektivitas secara simultan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai F hitung  $> F$  tabel maka artinya variabel independen (x) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (y).

Di lihat dari F hitung yaitu sebesar 244.782 dan F tabel sebesar 2,21. Hal ini berarti bahwa F hitung  $>$  dari pada F tabel yaitu  $244,782 > 2,21$  yang berarti bahwa Ho ditolak yang berarti Faktor ketepatan, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, efektivitas secara simultan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang pertama terbukti.

### 2). Uji T

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig.  $< 0,05$  maka artinya Variabel Independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Nilai t hitung  $>$  t tabel maka artinya variabel independen (X) secara Parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Dari hasil uji t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap keberhasilan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu dengan membandingkan antara hasil t hitung dengan t tabel pada confidence level sebesar 95% atau  $\alpha = 5\%$  pada degree of freedom (df) = 77 dengan nilai t tabel sebesar 2,22.

Hasil pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Variabel efektivitas (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian program pendaftaran sistematis lengkap , dimana t hitung lebih besar dari t tabel ( *t* hitung = 2,709 >

$t_{tabel} = 2,22$ )

- b. Variabel efisiensi (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian program pendaftaran sistematis lengkap, dimana  $t_{hitung} = 3,131 > t_{tabel} = 2,22$ )
- c. Variabel kecukupan (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian program pendaftaran sistematis lengkap, dimana  $t_{hitung} = 3,364 > t_{tabel} = 2,22$ )
- d. Variabel pemerataan (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian program pendaftaran sistematis lengkap, dimana  $t_{hitung} = 3,792 > t_{tabel} = 2,22$ )
- e. Variabel Responsivitas (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian program pendaftaran sistematis lengkap, dimana  $t_{hitung} = 3,288 > t_{tabel} = 2,22$ )
- f. Variabel ketepatan (X6) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian program pendaftaran sistematis lengkap, dimana  $t_{hitung} = 3,836 > t_{tabel} = 2,22$ )

Uji Hipotesis kedua :

**Ho** : Faktor ketepatan (X6) merupakan faktor yang tidak dominan dalam mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di toko modern

**H1** : Faktor ketepatan (X6) merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di toko modern

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel bebas yang mempengaruhi konsumen secara dominan adalah variabel ketepatan (X6) karena mempunyai nilai koefisien regresi yang sebesar yaitu 0,137. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel ketepatan (X6) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Indragiri Hilir terbukti.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa uji hipotesis yang dilakukan melalui uji F adalah faktor ketepatan (X1), efisiensi (X2), pemerataan (X3), kecukupan (X4), responsivitas (X5), efektivitas (X6) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Serta Hasil uji hipotesis yang dilakukan melalui uji T menyatakan bahwa faktor ketepatan (X6) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Indragiri Hilir karena mempunyai nilai koefisien regresi terbesar yaitu 0,137.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (2nd ed.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Cetakan Pertama. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Robbins, S.P., dan Judge, T.A. (2015). *Organization Behaviour*, Edisi Kelima belas, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sobirin, Achmad. (2007). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Subekhi, Ahmad., dan Jauhar, M. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka.
- Sukarno, Edi. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktiks*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, Mifta. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akibu, R. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Mpibabo Kabupaten Parigi Moutong. *E-Jurnal Katalogis, Volume 2(1)*, 8–14.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review, 5(3)*, 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Dunn, william N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3(1)*, 43–52. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Airlangga, 5*, 231–237.
- Publik, I. A., Mab, U., Publik, I. A., Mab, U., Publik, I. A., & Mab, U. (n.d.). 3 1 2 3.
- Satria, A. (2018). Tingkat Pendidikan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(2)*, 53–63.
- Struyk, R. J., & Haddaway, S. R. (2012). *Mentoring Policy Research Organizations: Project Evaluation Results. 23(3)*, 636–660. <https://doi.org/10.1007/sl>
- Widakdo, S. W. P. J., Holik, A., & Iska, L. N. (2021). Efek Usia dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. *Jurnal Penyuluhan, 17(1)*, 52–59. <https://doi.org/10.25015/17202131614>
- Hardianingsih, A.T. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Yogyakarta : Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada.
- Paskarianto, Heri. (2020). *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan*. Jakarta : Tugas Akhir Program Magister, Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Yuntarto, Hadi. (2017). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah*. Malang : Tugas Akhir Program Magister, Magister Ilmu Administrasi Publik Minat Perencanaan Pembangunan Daerah Universitas Brawijaya.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.